

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan adalah tolak ukur dalam menilai kesehatan perusahaan. IAI (2009:2) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu.

Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada pihak internal maupun eksternal. Pihak internal yang dimaksud terbagi menjadi 3, yaitu manajemen, pemegang saham atau investor, dan karyawan. Sedangkan pihak eksternal merupakan kreditor dan pemerintah.

Melihat pentingnya laporan keuangan dalam menilai kesehatan perusahaan, maka laporan keuangan harus disusun secara cermat dan terbebas dari bias. Laporan keuangan harus disajikan secara berkualitas agar dapat diinterpretasikan oleh para pihak yang memiliki kepentingan (*interested party*), maka dari itu setiap perusahaan harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu (1) dapat dipahami, (2) relevan, (3) reliabilitas/keandalan, (4) dapat dibandingkan.

Dari kelima karakteristik yang disebutkan di atas, jelaslah bahwa apabila sebuah perusahaan membutuhkan suatu alat yang dapat digunakan untuk menunjang dan mengendalikan kegiatan-kegiatan, yaitu salah satunya adalah sebuah sistem informasi yang efektif. Sistem informasi bertujuan untuk menghasilkan sebuah informasi.

Informasi akuntansi yang dihasilkan saat ini tidak hanya sekedar laporan keuangan tetapi semua informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi juga harus mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi dan pengendalian yang merupakan hal penting dalam menghadapi persaingan pada era globalisasi.

Bagi pimpinan perusahaan, informasi merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan peranya sebagai pengambil keputusan akhir dalam

perusahaan. Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi yang dilaksanakan dalam perusahaan harus memenuhi kriteria yang ditetapkan yaitu cepat, tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehinggadapat terus dipertahankan dan ditingkatkan dalam menyajikan laporan yang berkualitas bagi para penggunanya.

Pada era globalisasi ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat berkembang disertai dengan stabilitas nasional yang dinamis dan merupakan hasil dan upaya seluruh masyarakat Indonesia termasuk pemerintah dan dunia usaha. Hal ini tidak lepas dari tujuan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara untuk melaksanakan tugas dalam mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu dalam rangka pembangunan nasional maka upaya untuk mewujudkan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan kewajiban yang harus dilakukan secara berencana dan berkesinambungan.

Umur dan produktivitas manusia pada akhirnya ada batasnya. Tidak selamanya seseorang dapat terus bekerja dan menghasilkan suatu karya. Pada suatu saat ada waktunya tiba untuk berhenti dari pekerjaannya. Ketika waktu itu tiba kebutuhan hidup tetap harus terlaksana dan terpenuhi. Tentu saja hal ini mutlak memerlukan dukungan prasarana yang memadai. Salah satunya dengan mendapatkan dana pensiun.

Dana pensiun menurut UU No. 11 tahun 1992 tentang Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjajikan manfaat pensiun. Melalui undang-undang tersebut ditegaskan pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Lembaga Dana Pensiun digolongkan sebagai Lembaga Keuangan bukan bank karena Dana Pensiun menghimpun dana melalui peyertaan karyawan sebagai Peserta pensiun dan perusahaan sebagai pemberi kerja. Pada perinsipnya Dana

Pensiun merupakan salah satu alternative untuk memberikan manfaat kepada karyawan.

Dana pensiun memiliki peranan yang cukup penting yaitu sebagai penghimpunan dana yang selanjutnya dana yang telah terserap tersebut diinvestasikan dalam bentuk surat berharga Negara, obligasi, saham, reksadana, dan lain-lain. Setelah jatuh tempo, maka hasil dari investasi tersebut diolah kembali untuk dibagikan kepada seluruh peserta dana pensiun.

Berikut penulis sajikan total asset dan total Investasi dari Lembaga Dana Pensiun, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Total Aset dan Total Investasi Lembaga Dana Pensiun Indonesia (2008-2012)

Tahun	Total Aset Dana Pensiun (Triliun)	Total Investasi Dana Pensiun (Triliun)
2008	90.35	86.55
2009	112.35	108.06
2010	130.39	125.72
2011	141.58	137.13
2012	158.37	153.75

Sumber : www.ojk.go.id – Laporan Tahunan OJK Tahun 2013

Adapun total aset Dana Pensiun, sampai dengan tahun 2012, rata-rata pertumbuhan aset Dana Pensiun per tahun mampu mencapai angka 11,99%. Sedangkan untuk total investasi Dana Pensiun selama kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, nilai investasi Dana Pensiun meningkat sebesar 77,64%. Hal tersebut memberikan dampak positif, karena dengan peningkatan aset dan investasi, peranan Dana Pensiun dalam perekonomian nasional pun meningkat.

Selain memiliki peran sebagai penghimpunan dana dari para peserta, dana pensiun pun memiliki tanggung jawab yang cukup besar, karena lembaga ini telah dipercaya oleh peserta untuk mengelola dana yang mereka titipkan. Berikut penulis sajikan perkembangan jumlah peserta yang mengikuti program dana pensiun.

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah Peserta Dana Pensiun di Indonesia

Tahun	Jumlah Peserta Dana Pensiun	Kenaikan Jumlah Peserta
2008	2.559.112	5,41%
2009	2.681.226	4,77%
2010	2.817.997	5,10%
2011	3.082.708	9,39%
2012	3.345.798	8,53%

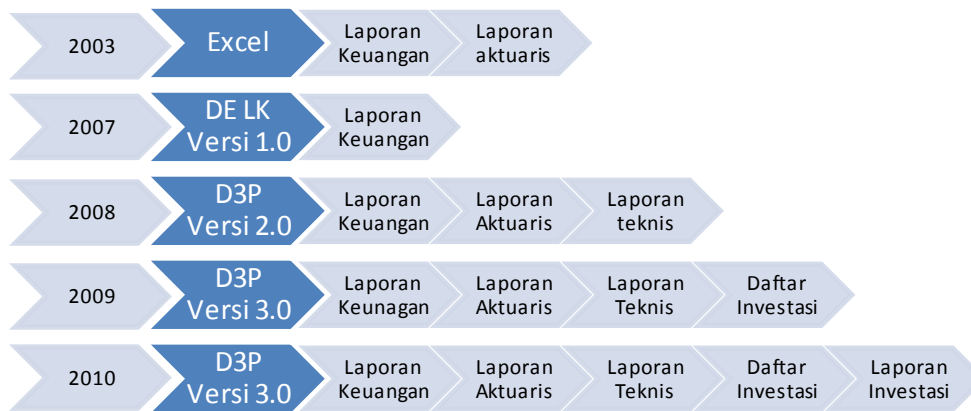
Sumber : www.ojk.go.id – Laporan Tahunan OJK Tahun 2013

Tabel 1.2 tersebut menunjukkan bahwa, setiap tahun jumlah peserta yang mengikuti program dana pensiun semakin meningkat walaupun pada tahun 2012 sempat mengalami penurunan, dengan begitu tanggung jawab yang dimiliki oleh lembaga ini semakin besar. Tanggung jawab tersebut diperuntukan bagi para *stakeholder* terutama peserta program dana pensiun. Salah satu bentuk tanggung jawab yang paling wajib dari lembaga ini adalah dengan membuat laporan keuangan. Oleh karena itu untuk memenuhi kriteria lembaga dana pensiun yang akuntabel, salah satunya yaitu laporan keuangan yang berkualitas.

Lembaga dana pensiun diminta oleh Bapepam-LK untuk melaporkan beberapa laporan keuangan pada suatu periode, diantaranya Laporan Keuangan semester I (*unaudited*), Laporan Keuangan Semester II (*unaudited*), Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*), Laporan Investasi Tahunan (*Audited*), Daftar Investasi Bulanan, Laporan Teknis, Laporan Aktuaris, serta pengumuman laporan keuangan audit di surat kabar Nasional yang khusus dilaksanakan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Selain kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan periodik dalam bentuk fisik, Bapepam-LK meminta Dana Pensiun untuk menyampaikan data laporan dimaksud melalui data digital secara elektronik. Untuk menyampaikan data tersebut, Biro Dana Pensiun menyediakan suatu aplikasi yang disebut Aplikasi Data Digital Dana Pensiun (D3P) yang dibangun dan dikembangkan bersama oleh Biro Dana Pensiun dan Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan (PUSINTEK) Kementerian Keuangan, Dengan aplikasi D3P, proses kompilasi data

di Biro Dana Pensiun menjadi lebih mudah dan cepat. Berikut penulis sajikan perkembangan aplikasi pengolahan data Laporan Keuangan dari tahun ke tahun.



Sumber : www.ojk.go.id – Laporan Tahunan OJK Tahun 2013

Gambar 1.1
Perkembangan Aplikasi Pengelola Data Laporan Keuangan

Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini yaitu dengan tindakan Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Kementerian BUMN RI, Komite Nasional Kebijakan Governance, serta Ikatan Akuntan Indonesia menyelenggarakan Annual Report Award 2013. Annual Report Award tahun ini memiliki tema "Membangun Daya Saing Ekonomi Indonesia untuk Menyongsong Integrasi Ekonomi ASEAN 2015 melalui Transparansi Informasi". Keikutsertaan perusahaan dalam Annual Report Award 2013 merupakan wujud penerapan Good Corporate Governance, serta dapat menjadi sarana bagi perusahaan untuk memperoleh masukan dari berbagai kalangan tentang seberapa baik laporan tahunan tersebut. Tentu ini bermanfaat untuk memantapkan keberadaan perusahaan di komunitas industri. Annual Report Award berlaku untuk semua jenis perusahaan, termasuk BUMN/BUMD, perusahaan terbuka, maupun perusahaan tertutup. Acara ini juga berlaku untuk Dana Pensiun, baik itu Dana Pensiun Lembaga Keuangan maupun Dana Pensiun Pemberi Kerja. (www.ojk.go.id, 30 April 2014)

Disisi lain pula Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Secara Elektronik oleh Emiten atau

Perusahaan Publik. Regulasi ini dibuat dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian laporan oleh Emiten atau Perusahaan Publik kepada OJK. Aturan juga memperhatikan Peraturan Nomor II.A.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-41/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 tentang Surat, Laporan dan Dokumen Lain yang Dikirim kepada Bapepam, serta Peraturan Nomor II.A.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-496/BL/2012 tanggal 14 September 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Elektronik. (www.ojk.go.id, 13 Mei 2014).

Dalam Laporan Biro Dana Pensiun tahun 2004, walaupun banyak yang telah menyampaikan laporan secara berkala, akan tetapi masih ada pula dana pensiun yang belum menyampaikan data digital secara elektronik kepada Biro Dana Pensiun. Dari hasil pengawasan masih ditemukan yang umum terjadi sebagai berikut:

1. Laporan Aktiva Bersih: Kesalahan dalam penentuan nilai wajar investasi, kesalahan pengelompokan investasi dan aktiva lain-lain.
2. Laporan Perubahan Aktiva Bersih: Kesalahan dalam menghitung iuran normal dan atau tambahan yang jatuh tempo, kesalahan dalam penentuan manfaat pension yang jatuh tempo, dan kesalahan dalam penetapan peningkatan penurunan nilai investasi.
3. Perhitungan Hasil Usaha: kesalahan atau tidak menghitung bunga keterlambatan pembayaran iuran dan kesalahan pengelompokan biaya investasi dan biaya oprasional.
4. Neraca: Kesalahan dalam perhitungan piutang iuran normal dan atau tambahan, kesalahan dalam perhitungan hutang manfaat pension, kesalahan dalam penentuan nilai investasi (terutama obligasi), kesalahan dalam kewajiban aktuarial, dan kesalahan penggunaan nilai kewajiban aktuarial (dalam hal tidak ada valuasi aktuarial).
5. Catatan atas Laporan Keuangan: sebagian besar berkaitan dengan kurangnya pengungkapan atas laporan keuangan. hal-hal penting yang berkaitan misalnya dengan pengelompokan obligasi, kepemilikan anak perusahaan, tanah,

bangunan dan tanah dan bangunan dalam laporan masih perlu dijelaskan lebih detail.

Kesalahan-kesalahan tersebut mengakibatkan gagalnya penyampaian laporan keuangan elektronik ke Biro Dana Pensiun yang kini diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bagi regulator, kesalahan diatas telah mengakibatkan terganggunya alur pengawasan yang seharusnya berjalan. Dari sisi penyediaan informasi, kesalahan atau ketiadaan laporan elektronik tersebut menyebabkan kelengkapan laporan baik untuk dana pension yang melakukan kesalahan maupun untuk keseluruhan dana pensiun menjadi tidak lengkap. Akibatnya, analisis atas laporan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Hal ini diakibatkan karena penguasaan dalam bidang teknologi informasi khususnya penggunaan D3P ini kurang di setiap penggunaannya.

Salah satu opini yang diberikan oleh salah satu auditor terhadap Lembaga Dana Pensiun UNISBA, yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahun 2009 disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali pada surat pengakuan utang yang direklasifikasi pada aktifa lain-lain sebesar Rp 9.500.000.000,00. (dapenunisba.blogspot.com, 12 Oktober 2010).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memantau lima perusahaan yang diantara salah satunya adalah PT Indah Karya yang mengalami kesulitan dalam keuangan sehingga tidak mampu dalam membayar kewajibannya kepada nasabah yaitu memberikan dana pensiun. (bisnis.com, 13 Juni 2013).

Selain hal-hal berikut, yang menjadi permasalahan sampai dengan saat ini adalah ketidaktepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan dalam lembaga tersebut. Berikut penulis sajikan jumlah Lembaga Dana pensiun yang tidak tepat waktu dalam pelaporan keuangan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Lembaga Dana Pensiun yang Tidak Tepat Waktu dalam Pelaporan Keuangan

Tahun	DPPK	Persentase	DPLK	Persentase
2009	27	9,78%	6	24%
2010	28	10,29%	3	12,5%
2011	22	8,15%	3	12%

Sumber : www.ojk.go.id – Laporan Tahunan OJK Tahun 2013

Dari tabel 1.3 di atas, perubahan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang tidak tepat dalam pelaporan keuangan setiap tahunnya tidak terlalu signifikan. Dalam kasus ini terdapat beberapa hal pemicu terjadinya keterlambatan pelaporan keuangan yang sehingga mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi, kapasitas sumber daya manusia, pengendalian internal serta komitmen organisasi merupakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Penelitian mengenai kualitas laporan keuangan ini, telah banyak dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh Ridwan (2009) dalam penelitiannya dengan hasil adanya Penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen mempunyai pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hayuning Tyas Rosdiani (2011) menyatakan bahwa pengendalian internal yang paling dominan dan ditemukan sebesar 12,7% variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan namun tidak termasuk pada penelitian tersebut. Kemudian adapun saran pada penelitian yang dilakukan oleh Meilani Fadhillah (2013) yang menyatakan ada kemungkinan pengaruh variable lain yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan. Muhamad Nuryanto dan Nunuy Nur Afiah (2010) menyatakan kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 26,50%, dan pengendalian internal sebesar 25,96% serta teknologi informasi sebesar 13,15%.

Penelitian mengenai kualitas laporan keuangan yang banyak diteliti bertempat di kantor pemerintah daerah seperti yang dilakukan oleh Nurul Yuniar Lediana (2013) di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang menunjukkan bahwa efektivitas penerapan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, dengan pengaruh sebesar 53,0%.

Adapun alasan penulis melakukan penelitian pada Lembaga Dana Pensiun di Jawa Barat karena dalam penelitian yang dilakukan oleh Mailani Fadhillah (2013) hanya menguji kualitas laporan keuangan pada Lembaga Dana Pensiun yang ada di kota Bandung saja dan hanya mengukur pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian internalnya saja, sedangkan hal lain yang bisa

berpengaruh dalam kualitas laporan keuangan lainnya adalah teknologi informasi yang berupa suatu sistem informasi akuntansi. Selain itu, penelitian ini dilakukan di Jawa Barat karena saat ini Jawa Barat sedang sangat berkembang sehingga banyak berdiri perusahaan-perusahaan yang tentunya memiliki jumlah pekerja yang semakin bertambah setiap tahunnya. Sebagai peserta maupun masyarakat sangat membutuhkan informasi mengenai kualitas dari laporan keuangan pengelola dana pensiun. Sehingga penulis pun tertarik untuk mengetahui hal tersebut dengan melakukan survey di Jawa Barat.

Berdasarkan uraian yang telah dikaji diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Lembaga Dana Pensiun mengenai **“Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah berdasarakan fenomena yang ada maka pada penelitian penulis ini dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Lembaga Dana Pensiun yang terdapat di Jawa Barat?
2. Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan pada Lembaga Dana Pensiun yang terdapat di Jawa Barat?
3. Seberapa besar pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Laporan Keuangan pada Lembaga Dana Pensiun yang terdapat Jawa Barat?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini dilakukan adalah untuk memperoleh gambaran mengenai sistem informasi akuntansi dan pengaruhnya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, dan dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Lembaga Dana Pensiun yang terdapat di Jawa Barat.
2. Mengetahui Kualitas Laporan Keuangan pada Lembaga Dana Pensiun yang terdapat di Jawa Barat.

3. Mengetahui besar pengaruh Penerapan Sitem Informasi Akuntansi terhadap Laporan Keuangan pada Lembaga Dana Pensiun yang terdapat di Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Secara Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap Lembaga Dana Pensiun yang terdapat di Jawa Barat dalam penerapan sstem informasi akuntansi dalam kaitanya dengan kualitas laporan keuangan dan hal-hal lain yang terkait didalamnya. Bagi penulis sendiri, penelitian ini merupakan pelatihan intelektual yang diharapkan mampu meningkatkan pemahaman terutama terkai sistem informasi akuntansi, aspek penyajian laporan keuangan yang berkualitas dan yang terkait didalamnya.

2. Secara Akademis

Diharapkan melalui hasil penelitian ini dapat memperkaya keilmuan akuntansi terutama dalam bidang sistem informasi akuntansi. Diharapkan juga dari hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.